

ISBN : 978-979-26-1970-6

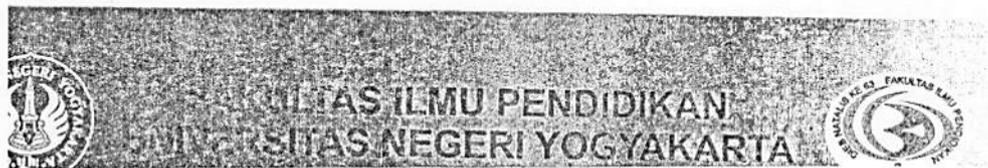
PENDIDIKAN POPULIS BERWAWASAN BUDAYA



FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



PENDIDIKAN POPULIS BERWAWASAN BUDAYA



PENDIDIKAN POPULIS BERWAWASAN BUDAYA

ISBN : 979-26-1970-4
978-979-26-1970-6

Hak Cipta dilindungi Undang - Undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apa pun, secara elektronik maupun mekanis, tanpa izin tertulis dari penerbit.

All Rights Reserved

Cetakan 1, Agustus 2013

Editor : Sujarwo
Sugeng Bayu Wahyono
Rukiyati
Iis Prasetyo
Dwi Esti Andriani
Layout & desain cover : Mareta Puspita

Percetakan
Ash-Shaff
Jl. Timoho No. 124 Yogyakarta 55221
Telp. (0274) 586243 Fax. (0274) 557793
Email: shaff_ash@yahoo.com

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Sambutan	iii
Pengantar	v
Daftar Isi	vii
PENDIDIKAN POPULIS: IMPLIKASI METODOLOGIS PADA RISET PENDIDIKAN DI PERGURUAN TINGGI Ariefa Eflaningrum, M.Si	1
URGENSI KEBIJAKAN PENDIDIKAN POPULIS PRO MASYARAKAT MISKIN Arif Rohman, M.Si	29
MEMBANGUN BUDAYA SEKOLAH INKLUSIF BAGI ANAK BERKEBUTUHAN PENDIDIKAN KHUSUS MENUJU PENDIDIKAN INKLUSIF Dr. Sari Rudiwati, M.Pd	58
BELAJAR MEMBANGUN KEBUDAYAAN PENDIDIKAN PADA MASYARAKAT SEDERHANA S. Wisni Septiarti	88
MENJAGA KEHARMONISAN HIDUP DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA MELALUI PENDIDIKAN IPS Anwar Senen, M.Pd	111 v
ORIENTASI FILOSOFIS PENDEKATAN KONSELING: PENGARUH EKSISTENSIALISME DALAM KONSELING Sigit Sanyata, M.Pd	137
MENGEMBANGKAN SENSITIVITAS BUDAYA PADA PENDIDIKAN DAN PESERTA DIDIK ANAK USIA DINI Yulia Ayriza, M.Si	162

DAUN PISANG SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN KONSEP PENJUMLAHAN BILANGAN PECAHAN DI SEKOLAH DASAR PADA PENDIDIKAN MATEMATIKA REALISTIK BERBASIS BUDAYA Rahayu Condro Murti, M.Si	182
KONSELING LINTAS BUDAYA: KONSTRUKSI HISTORIS DAN APLIKASINYA DALAM BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH Agus Basuki, M.Pd	202
KONSEPSI BUDAYA MENURUT PETER L. BERGER DAN IMPLIKASINYA DALAM PENDIDIKAN Entoh Tohani, M.Pd	223
KAPITALISME PENDIDIKAN VS PENDIDIKAN POPULIS: PENDEKATAN KULTURAL DAN MODAL SOSIAL DALAM MEMBANGUN TERDIDIK Dr. Siti Irine Astuti Dwiningrum, M.Si	239
POTENSI SUMBER DAYA ALAM DAN PENDIDIKAN BERBASIS BUDAYA LOKAL P. Sarjiman, M.Pd	280
PENDIDIKAN BAGI KAUM LANJUT USIA (UPAYA MEMENUHI PENDIDIKAN UNTUK SEMUA BERBASIS MODAL SOSIAL) Sri Iswanti, M.Pd	302
<i>GUIDANCE FOR ALL</i> SEBAGAI UPAYA PEMBENTUKAN KARAKTER SISWA Sugiyatno	328

**MENJAGA KEHARMONISAN HIDUP DALAM BERBANGSA
DAN BERNEGARA MELALUI PENDIDIKAN IPS
(Pendekatan Pembelajaran Berbasis Pendidikan Nilai)**

Oleh:

Anwar Senen, M.Pd

anwarsenen.anwarsenen@gmail.com

Pendahuluan

Sejak bergulirnya reformasi yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto sebagai penguasa Orde Baru, kehidupan berbangsa dan bernegara mengalami goncangan ke arah disintegrasi yang mengkhawatirkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Konflik sosial di tengah masyarakat dalam kehidupan bernegara muncul silih berganti seolah tidak akan pernah selesai. Latar belakang sosial budaya, agama, etnik, politik, golongan, dan ekonomi sering menjadi pemicu terjadinya konflik ini. Dari ujung Sumatera bagian barat sampai Papua, ujung timur wilayah Indonesia masih segar pernah terjadi konflik sosial yang dipicu oleh kepentingan-kepentingan primordialisme. Konflik di Aceh, Sampit, Poso, separatisme di Papua, konflik antar golongan dalam beragama di Madura, kekerasan atas nama agama di Jawa, dan lain-lain adalah bukti betapa nilai-nilai luhur bangsa yang disimbulkan dalam lambang negara "Garuda Pancasila" dengan semboyan "Bhineka Tunggal Ika"

seolah telah hilang pada generasi bangsa di era reformasi sekarang ini.

Suatu kekhawatiran, bahwa generasi muda telah kehilangan nilai-nilai luhur bangsa yang menjunjung tinggi toleransi dalam kemajemukan di negara yang berdasarkan Pancasila ini sungguh tidak mengada-ada. Subarkah (*Republika*, 2013) dalam tulisan yang berjudul "Arus Radikalisme Melanda Kaum Muda" mengatakan, bahwa generasi muda makin kuyup dengan potensi melakukan gerakan radikalisme. Melalui survei yang digelar pada Oktober 2010 hingga Januari 2011 di 59 sekolah swasta dan 41 sekolah negeri di 10 wilayah se-Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, serta mengambil sampel dari 993 siswa SMP dan SMA, menunjukkan hasil mencengangkan. Survei ini menunjukkan bahwa hampir 50 % dari pelajar setuju tindakan kekerasan atau aksi radikal demi agama, 14,2 % menyatakan setuju atas aksi terorisme yang dilakukan Islam Samudra, Amrozi, dan Nurdin M Top. Selain itu, 84 % setuju dengan penegakan syari'at Islam. Lebih mengejutkan lagi, sebanyak 25,8 % menganggap Pancasila sudah tidak relevan lagi sebagai ideologi negara.

Berdasarkan pada uraian di atas, kiranya pendidikan nilai perlu mendapat perhatian cukup besar dalam proses pembelajaran IPS. Guru Pendidikan IPS dituntut

kreatifitasnya untuk dapat menyampaikan pembelajaran bersumber pada situasi sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Hal ini penting dilakukan, agar pembelajaran IPS memiliki makna dalam kehidupan siswa sehari-hari sebagai warga negara yang baik dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI.

Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Indonesia sebagai Sumber Belajar IPS

”. Potensi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia memungkinkan untuk dijadikan sebagai sumber belajar IPS di sekolah. Oleh karena itu, permasalahan sosial-budaya dengan segala dinamikanya perlu mendapat perhatian yang besar oleh guru. Guru IPS diharapkan dapat mengembangkan materi pelajaran bersumber pada realitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara kontekstual dan aktual. Maryani (2011: 5-6) mengatakan bahwa guru pendidikan IPS perlu melakukan perubahan paradigma sistem dan model pendekatan pembelajaran, yang semula berpusat pada guru (*teacher centered*) berubah menjadi berorientasi pada aktivitas siswa (*student centered*), dari pasif ke pendekatan aktif atau partisipatoris. Materi pembelajaran disesuaikan dengan keseharian hidup siswa

(disajikan secara kontekstual), dan proses pembelajaran harus berorientasi pada: 1) tujuan pendidikan yang hendak dicapai (kompetensi; 2) menguasai konten pendidikan IPS; 3) pembelajaran bersifat individual dan kelompok; 4) pembelajaran lebih mengaktifkan siswa; 5) pembelajaran tidak terpisah dengan kehidupan siswa.

Dikatakan oleh Hasan (1996: 47) bahwa Pendidikan IPS sangat erat kaitannya dengan pendidikan nilai. Pendidikan IPS dapat membantu dalam upaya pembentukan akhlak dan martabat bangsa. Pengembangan nilai pada diri siswa dilakukan dalam interaksi berdasarkan prinsip-prinsip, pemahaman terhadap nilai dan moral, penghargaan terhadap nilai moral, identifikasi terhadap nilai-nilai moral, penerapan nilai dalam perilaku dan pembentukan wawasan serta kebiasaan.

Pada pendidikan IPS, dimensi nilai yang terkandung di dalamnya mengajarkan kepada peserta didik untuk mengembangkan sikap toleran, empati, bertanggungjawab dalam menggunakan hak dan kewajiban. Sumaatmadja (2005) mengemukakan bahwa nilai-nilai yang dapat dikembangkan dalam IPS meliputi: nilai edukatif, nilai praktis, nilai teoritis, nilai filsafat dan nilai ketuhanan. Lebih rinci, dijelaskan sebagai berikut :

- a) Nilai edukatif. Melalui pendidikan IPS, perasaan, kesadaran, penghayatan, sikap, kepedulian, dan tanggung jawab sosial peserta didik ditingkatkan untuk mengubah perilaku peserta didik sehingga dapat bekerja sama, gotong royong dan membantu pihak-pihak yang membutuhkan;
- b) Nilai praktis. Pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat umur dan kegiatan peserta didik sehari-hari. Pengetahuan IPS yang praktis tersebut bermanfaat dalam mengikuti berita, mendengarkan radio, membaca majalah, menghadapi permasalahan kehidupan sehari-hari.
- c) Nilai teoritis. Peserta didik dibina dan dikembangkan kemampuan nalarnya ke arah dorongan mengetahui kenyataan (*sense of reality*), dan dorongan menggali sendiri di lapangan (*sense or discovery*). Kemampuan menyelidiki, meneliti dengan mengajukan berbagai pernyataan (*sense of inquiry*) yang relevan.
- d) Nilai filsafat. Peserta didik dikembangkan kesadaran dan penghayatan terhadap keberadaannya di tengah-tengah masyarakat, bahkan di tengah-tengah alam raya ini. Dari kesadaran keberadaan tadi, mereka disadarkan pula tentang peranannya masing-masing terhadap

masyarakat, bahkan terhadap lingkungan secara keseluruhan.

- e) Nilai ketuhanan. Pembelajaran IPS menjadi landasan untuk mendekatkan diri dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada-Nya. Kekaguman siswa selaku manusia kepada segala ciptaan-Nya, baik berupa fenomena fisik-alamiah maupun fenomena sosial yang berkembang dalam kehidupan menambah keimanannya.

Salah satu tema yang terkandung dalam materi IPS di sekolah adalah menghargai keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Berdasarkan pada tema tersebut guru memiliki peluang cukup luas untuk menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa untuk dijadikan inspirasi dalam membangun pribadi siswa agar cinta tanah air dengan semangat toleransi dan persatuan. Budimansyah (2008: 26-50) mengemukakan unsur-unsur yang membentuk bangsa dan negara Indonesia adalah suku bangsa, kepulauan, kebudayaan, golongan, dan agama. Persatuan bangsa dan wilayah negara Indonesia digambarkan dalam lambang negara "Garuda Pancasila" dengan semboyan "Bhineka Tunggal Ika". Bhineka tunggal Ika memiliki makna meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa yang memiliki adat istiadat berbeda, kebudayaan serta karakter yang berbeda-beda, memiliki

agama yang berbeda-beda, dan terdiri dari beribu-ribu pulau di wilayah Nusantara, namun keseluruhannya adalah merupakan satu kesatuan bangsa dan negara Indonesia; tidak terpisahkan..

Bangsa Indonesia menganut paham negara yang integralistik didasarkan pada pemahaman bahwa negara Indonesia:

- a) Tidak memihak kepada yang kuat. Perbedaan pendapat dihargai dan dilindungi undang-undang.
- b) Tidak mengenal dominasi mayoritas. Sekalipun ada gagasan yang datang dari kelompok kecil, namun jika gagasan tersebut dinilai amat baik, maka melalui asa musyawarah gagasan tersebut dapat menjadi keputusan bersama.
- c) Tidak mengenal tirani mayoritas. Tirani minoritas kebalikan dari dominasi mayoritas, yakni kelompok kecil menguasai kelompok besar.

Sukadi (2012: 86) menjelaskan bahwa masyarakat dan bangsa Indonesia adalah masyarakat yang pluralistik, tetapi sekaligus adalah masyarakat yang monopluralistik dan monodualistik. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang monopluralistik dalam dimensi suku, agama, ras, antar golongan, kebiasaan dan adat istiadat, bahasa daerah, kesenian, kebudayaannya, dan mendiami ribuan pulau besar

dan kecil, tetapi menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia yang bernaung dalam wadah NKRI. Manusia dan masyarakat Indonesia juga adalah makhluk monodualistik tersusun sebagai satu kesatuan dari susunan kodrat sebagai makhluk jasmaniah dan rohaniah serta dari sifat kodrat sebagai makhluk individu dan sosial. Masyarakat pluralistik yang hidup harmonis dalam kesatuan hidup berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI ini digambarkan dalam semboyan negara "Bhineka Tunggal Ika".

Salah satu tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang menurut Swasono (2012: 5-6) bukanlah hanya bermakna mencerdaskan otak intelektual bangsa; bukan hanya mengatasi kebodohan sosial, tetapi juga harus melawan keterbelakangan sosial. Dengan mencerdaskan kehidupan bangsa berarti kita berupaya meningkatkan kualitas: ketakwaan, literasi sains, literasi sosial, seni dan budaya, keberadaban, kesadaran sejarah, geografi dan spasial, ideologi, persatuan, kebersamaan dan gotong royong (kerakyatan), solidaritas, penguasaan iptek, kedaulatan, kemandirian, martabat, kesetaraan, modernisasi, keberanian, kejujuran, dan humanisme.

Dikatakan oleh Bashir (*Kedaulatan Rakyat*: 2007) bahwa generasi muda dewasa ini kurang memperhatikan

moral. Hal ini tercermin dari perilaku tidak menghormati nilai-nilai kemanusiaan, seperti terlibat tawuran, kurang menghormati orang tua, kurang menaati norma-norma keluarga, dan hidup tidak disiplin. Terlebih pada masa globalisasi, cenderung berperilaku keras, cepat, akseleratif dalam menyelesaikan sesuatu, dan budaya instan. Orang dipaksa hidup seperti robot, selalu berada pada persaingan tinggi (penuh dengan konflik) dengan sesamanya, hidup bagaikan roda berputar cepat, yang membuat manusia mengalami disorientasi sehingga meninggalkan norma-norma universal. Dalam hal ini menggunakan konsep Machiavelli, yaitu menghalalkan segala cara, mementingkan diri sendiri dan tidak memiliki moral yang baik, tidak menghargai, tidak peduli, tidak mengasihi, dan tidak mencintai sesamanya semakin tampak dalam kehidupan nyata.

Pada tingkat persekolahan, pembelajaran IPS mempunyai nilai strategis dalam kaitannya dengan pembangunan bangsa masa kini dan masa mendatang. Pembelajaran IPS akan mengembangkan pemahaman siswa berkaitan dengan perkembangan "poleksosbud" terkini dan terhadap peristiwa atau kejadian masa lampau untuk dijadikan dasar perilaku di masa kini, khususnya dalam menghadapi perkembangan masyarakat yang serba dinamis.

Permasalahan yang sifatnya konseptual dalam pembelajaran IPS, adalah pemaknaan terhadap tujuan IPS teredusir oleh orientasi yang sangat kuat terhadap pencapaian target kurikulum dalam arti sempit, yaitu menyajikan semua bahan di dalam kurikulum secara *textbook*. Para guru dalam proses pembelajaran bersifat tekstual, tujuan pembelajaran yang sarat dengan nilai moral dan instrumentalnya belum optimal disampaikan kepada siswa. Pembelajaran disajikan lebih menekankan pada keberhasilan belajar bersifat kognitif belaka. Semangat pembelajaran disajikan sebagai kewajiban menghabiskan materi ajar untuk memperoleh nilai rapor yang tidak mencerminkan keberhasilan belajar dalam bentuk perubahan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari pada diri siswa. Hal ini diperkuat hasil penelitian oleh Hadi (1997: 101) yang menyatakan, "Hasil pembelajaran siswa dalam proses belajar mengajar IPS di kelas lebih banyak tertuju pada aspek kognitif (pengetahuan) yang hanya meliputi aspek hafalan dan pemahaman, serta kurang mengarah pada pencapaian hasil belajar pada aspek aplikasi, analisis, dan evaluasi".

Bila sasaran akhir proses pendidikan adalah kemandirian siswa, maka perubahan harus dimulai dari kinerja profesional guru. Proses pendidikan harus

merupakan suatu konteks pembelajaran yang tidak otoriter di dalam situasi mana siswa dapat menciptakan makna bagi dirinya sendiri. Peran guru adalah mengidentifikasi tentang berbagai perspektif belajar siswa dan mengintegrasikannya di dalam pembelajaran yang diselenggarakan. Dengan demikian seorang guru harus memiliki pengetahuan tentang diri anak, ekspektasi pengalaman anak sebelumnya dan mengembangkannya secara optimal selama pembelajaran. Menciptaan kondisi dan kesiapan diri siswa untuk belajar agar bahan dan tugas-tugas belajar yang diberikan, memiliki makna, dipandang penting serta relevan dengan apa yang telah mereka ketahui atau alami sebelumnya.

Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan tujuan pendidikan IPS untuk mencerdaskan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berkenaan dengan pengembangan kemampuan/ kompetensi kecerdasan dan keterampilan sosial siswa, peningkatan kualitas bukan semata-mata masalah metodologi dan kemampuan akademik profesional guru, akan tetapi masalah sosial budaya yang sedang berkembang di masyarakat perlu menjadi referensi dalam proses pembelajaran. Apabila hal ini dapat dilakukan dengan baik, maka diharapkan dapat tercapai tujuan pendidikan nasional, yakni: "mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia

seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, dan kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan

Pengembangan Pendidikan Nilai dalam IPS

Tujuan pendidikan nilai menurut Elmubarok (2008: 44) adalah pertumbuhan dan perkembangan diri peserta didik secara utuh sehingga mereka menjadi pribadi dewasa yang matang dan mapan, mampu menghadapi berbagai masalah dan konflik dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran perlu dengan cara yang humanis dengan mengembangkan berpikir aktif-positif. Dewasa ini, generasi muda (siswa) tidak menunjukkan kekuatan kualitas karakter pribadi yang kuat menghadapi realitas kehidupan yang semakin kompetitif.

Sauri, (2010: 20-22) mengatakan, pendidikan nilai secara sosial memiliki tujuan membangun kesadaran interpersonal yang mendalam kepada siswa. Dalam hal ini, siswa dibimbing untuk mampu menjalin hubungan sosial secara harmonis dengan orang lain melalui sikap dan perilaku yang baik sehingga mereka dapat hidup secara sehat dan harmonis dalam lingkungan sosialnya. Dalam

kehidupan sosial, mereka dilatih untuk dapat berprinsip baik kepada orang lain, berempati, suka menolong, bertanggung jawab, dan juga menghargai perbedaan pendapat. Dalam transfer nilai kepada anak, sekolah bukanlah satu-satunya yang berperan menanamkan nilai-moral. Peran keluarga dan lingkungan masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam membentuk pribadi anak (siswa). Keluarga adalah salah satu kelompok sosial yang ada di masyarakat. Di dalam keluarga, anak pertama kali mendapatkan pendidikan seperti penanaman nilai moral dan budaya. Lingkungan keluarga merupakan pusat pendidikan penting bagi perkembangan moral, akhlak, dan budi pekerti anak. Sementara, Wahjoetomo (1994: 9) berpendapat bahwa tujuan pendidikan nilai adalah menumbuhkan sikap mental dan kepribadian peserta didik yang memiliki ciri-ciri: a) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b) memiliki budi pekerti luhur; c) berkepribadian, mandiri, maju, dan tangguh; d) memiliki disiplin yang tinggi dan bertanggung jawab; e) memiliki etos kerja dan produktif; f) sehat jasmani dan rohani; g) memiliki jiwa patriotik, semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial, dan; h) memiliki kesadaran historis namun memiliki orientasi ke masa depan. Dalam pendidikan IPS, perlu ditekankan pada substansi tujuan pembelajaran yang dikembangkan untuk menjadi bekal bermakna bagi

kehidupan siswa sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penekanan pada substansi yang dimaksud adalah pengembangan nilai-nilai luhur bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penanaman nilai memiliki ciri-ciri berikut : (a) mengomunikasikan kepercayaan disertai alasan yang mendasarinya, (b) memperlakukan orang lain dengan adil, (c) menghargai pandangan orang lain, (d) mengemukakan keragu-raguan atau perasaan tidak percaya disertai dengan alasan, dan dengan rasa hormat, (e) tidak sepenuhnya mengontrol lingkungan untuk meningkatkan kemungkinan penyampaian nilai-nilai yang dikehendaki, dan mencegah kemungkinan penyampaian nilai-nilai yang tidak dikehendaki, (f) menciptakan pengalaman sosial dan emosional mengenai nilai-nilai yang dikehendaki, tidak secara ekstrim, (g) membuat aturan, memberikan penghargaan, dan memberikan konsekuensi disertai alasan, (h) menjaga komunikasi dengan pihak yang tidak setuju, dan (i) memberikan kebebasan bagi adanya perilaku yang berbeda-beda, apabila sampai pada tingkat yang tidak dapat diterima, diarahkan untuk memberikan kemungkinan berubah (Kirschenbaum, 1995 dalam Zuchdi, 2013: 17).

Tiga ranah kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor harus masuk dalam tujuan pembelajaran IPS. Tiga ranah tersebut sesuai yang dikemukakan Schuncke (1988: 8) yaitu "(1) *knowledge, or conceptual, goals include those things that we want children to know as a result of their experience with us, (2) process goals include those things wich we would like our students to be able to do, (3) affective goals deal with the caring and feeling aspect of being human*". Bahwa, kemampuan pengetahuan atau konseptual di dalamnya mencakup apa yang ingin diketahui siswa sebagai hasil pengalamannya, ranah ketrampilan mencakup tujuan-tujuan melalui proses di mana siswa akan dapat melakukannya setelah mengikuti pembelajaran, dan tujuan pada ranah afektif berkaitan dengan aspek kepedulian dan perasaan sebagai manusia.

Dikatakan oleh Scuncke (1988: 8-9) bahwa pelaksanaan pendidikan IPS mengembangkan tiga kemampuan dasar siswa, yaitu kemampuan penguasaan bidang pengetahuan (*knowing*), kecakapan melaksanakan kegiatan untuk menguasai sejumlah pengetahuan dari berbagai sumber belajar (*doing*) serta apresiasi, penguasaan dan penginternalisasian bidang nilai dan sikap untuk menjadi manusia seutuhnya (*caring*). Ketiga kemampuan

dasar ini memiliki kaitan yang sangat erat dan bersifat paralel, sehingga kemampuan dasar ini perlu dikembangkan secara seimbang.

Dalam melaksanakan pembelajaran berbasis moral atau pendidikan nilai guru perlu menggunakan paradigma konstruktivistik. Nucci (2008: 360) berkata :

“One of constructivist teachers’ primary aims is for children to become more and more able to regulate their own behavior in the absence of adult authority. In order to promote autonomy and prevent an overbalance of heteronomy, constructivist teachers consciously monitor their interactions with children. Authoritarian demands, emotional intimidation, and arbitrary punishments have no place in a constructivist classroom; neither do passive permissiveness or “letting children run wild”-that is, failing to take action when rules are broken and when children engage in unsafe, aggressive, or defiant behaviors.

Constructivist teachers strive to support children in constructing internal feelings of necessity about behaving in socially acceptable ways. One way they do this is by refraining from punishing children, and instead looking for opportunities for children to learn from the logical or natural consequences of their actions. For example, when a child splashes water out of the water table, rather than lecturing or punishing, a constructivist teacher may point out the natural consequence and require that the child clean up the water”.

Salah satu tujuan utama guru konstruktivis adalah agar anak-anak menjadi lebih dan lebih mampu mengatur

perilaku mereka sendiri dengan tidak adanya otoritas dari orang dewasa. Guru konstruktivis secara sadar memonitor interaksi para siswa. Membatasi kekuasaan, intimidasi emosional, dan hukuman sewenang-wenang tidak memiliki tempat dalam kelas konstruktivistik, juga adalah kegagalan ketika "membiarkan anak-anak liar", mengambil tindakan ketika aturan telah rusak dan ketika keterterlibatan anak-anak tidak lagi aman, agresif, atau berperilaku membangkang.

Guru konstruktivistik berusaha untuk mendukung anak-anak dalam membangun perasaan internal tentang perlunya berperilaku dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Salah satu cara melakukan ini adalah dengan menahan diri dari menghukum anak-anak. Misalnya, ketika seorang anak mencipratkan air ke luar dari wadahnya, daripada ceramah atau menghukum, guru konstruktivistik dapat menunjukkan konsekuensi alamiah dan mengharuskan anak membersihkan air yang berceceran tersebut.

Kearifan Jawa dalam Membangun Keharmonisan Berbangsa dan Bernegara

Dalam lingkungan sosial kehidupan siswa tentu ada nilai-nilai kearifan yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar IPS untuk membentuk pribadi anak sebagai bagian

dari kekayaan budaya nasional yang perlu dilestarikan. Misalnya, pada masyarakat Jawa banyak nilai kearifan budaya dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi untuk membangun jati diri bangsa. Dalam kehidupan masyarakat Jawa mengenal kebajikan hidup "*pasrah sumarah*". Dikatakan oleh Pasha (2011: 19-103) dalam konteks kehidupan bernegara, bahwa sikap *pasrah sumarah* itu sangat menguntungkan. Orang Jawa hampir secara penuh menyerahkan kedaulatannya kepada pemimpin. Kepada pemerintah orang Jawa tidak pernah menuntut macam-macam, bila ketentraman dan keamanan sudah mereka dapatkan, maka mereka tidak menuntut lebih.

Sikap yang ditunjukkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dijadikan contoh tentang sikap *pasrah sumarah* yang membawa kedamaian dan keharmonisan. Baskoro (2010 : 120-121) menjelaskan, bahwa dalam sejarah kepemimpinan Sri Sultan HB IX dan Sri PA VIII tampak nyata memperjuangkan visi itu tidak selalu harus dengan sikap *ngotot*. Ketika draf demi draf RUU no. 5 Tahun 1974 digulirkan dengan tendensi menghapus keistimewaan D. I. Aceh dan DIY, Sri Paku Alam VIII tidak memberikan reaksi ketidaksetujuan sebagaimana disampaikan oleh Gubernur D.I. Aceh waktu itu. Sri PA VIII

malahan menunjukkan sikap loyalnya kepada Pemerintah Pusat. Sikap mengalah itu ternyata, bukannya berakhir dengan kekalahan. Justru sebaliknya, dalam kesepakatan terakhir keistimewaan DIY tetap berlaku.

Kebesaran Sri Sultan HB IX terlihat ketika sengaja menolak untuk terus memimpin setelah tugasnya untuk menyelamatkan bangsa ini dirasa cukup. Di depan Sidang Umum MPR, Sri Sultan HB IX menyatakan tidak mau dipilih lagi menjadi Wakil Presiden. Ia memilih mundur dan mengembalikan tahta untuk rakyat.

Pada saat itu keputusan Sri Sultan HB IX untuk mundur mengundang kontroversi tersendiri, apalagi masih dijagokan oleh Golkar, partai mayoritas tunggal. Pernyataan Sri Sultan HB IX di depan SU MPR (12 Maret 1978) adalah:

“Keputusan ini saya ambil antara lain dengan menggunakan pertimbangan kesehatan saya dewasa ini. Pertimbangan lain setelah saya renungkan dalam-dalam ialah adanya rasa tanggung jawab di mana tumbuhlah suatu keinginan dalam jiwa saya untuk memberikan bakti lebih besar dan lebih efektif kepada negara dan bangsa. Hal ini hanya dapat saya laksanakan apabila saya melepaskan diri dari hambatan resmi yang melekat pada kedudukan Wakil Presiden. Setelah mengambil keputusan ini, saya merasa masih cukup mampu dan karena itu bersedia, apabila dikehendaki, untuk membantu kelanjutan usaha pembangunan nasional di negara ini.” (Sinar

Harapan, 13 Maret 1978; buku "Sri Sultan : Hari-hari HB IX").

Dari statement tersebut di atas tampak bahwa bagi Sri Sultan HB IX, memimpin adalah mengabdikan kepada rakyat, bangsa, dan Negara dengan penuh rasa tanggung jawab. Keterlibatan di dalam system sering kali menjerat seorang pemimpin untuk menjadi rakus akan kekuasaan. Mengabdikan kepada bangsa dan Negara seringkali lebih efektif dilakukan di luar system, tidak terbatas oleh status. Untuk Mengabdikan kepada Negara adalah amanah seumur hidup tanpa perlu menduduki jabatan seumur hidup, rakyatlah yang bertahta, siapa menjadi pemimpin hendaknya menjadi pelayan.

Dalam hal toleransi, Santosa (2012: 9-12) menjelaskan bahwa masyarakat Jawa memiliki kearifan yang mengajarkan *Tepa slira*. Arti *Tepa* (ukuran), *slira* (badan) ialah diukur atau dikenakan di badan sendiri, atau *ditepakake awake dhewe*. Jadi yang dimaksud *tepa slira* adalah imbauan agar segala sesuatu yang terjadi diusahakan untuk diukur atau diterapkan pada diri sendiri. Dengan demikian, sikap dan perbuatan kita tidak akan semena-mena, atau semau sendiri tanpa mempedulikan orang lain. *Tepa slira* merupakan salah satu ajaran penting pada masyarakat Jawa dalam menciptakan tenggang rasa.

ntohnya, kalau merasa sakit ketika dicubit, maka janganlah mencubit orang lain. Jika tersinggung kalau diejek mengenai kelemahan diri sendiri, maka jangan pula mengejek kelemahan orang lain., karena dia juga pasti tersinggung.

Dengan memiliki kebiasaan mengukur (menerapkan) segala sesuatu di badan sendiri, orang yang bersangkutan akan selalu berusaha menghargai orang lain. Tegur katanya jaga agar tidak menyinggung (menyakiti) siapapun lawan caranya, perangnya lembut karena menyadari bahwa dup tidak mungkin sendirian dan selalu membutuhkan orang lain. Orang yang telah memiliki sifat *tepa slira* akan jauh dari sikap *gumedhe* (merasa besar), *kuminter* (merasa andai), *sawiyah-wiyah* (semena-mena), *kumalungkung* (mengingkari), *daksiya* (suka menyiksa/dholim), dan sebagainya yang tidak disukai, menyakitkan, dan merugikan orang lain.

Ross (dalam Wiriadmadja, 2002 : 304-305) mengatakan, bahwa setiap orang menghayati kehidupan dengan caranya sendiri, bahkan juga di dalam menanggapi tantangan dari luar, dengan perspektifnya sendiri. Akan tetapi, sebagai anggota dari suatu kelompok, komunitas masyarakat bangsa, bahkan dunia diperlukan pendekatan pandangan yang lain, seperti :

- 1) Perspektif diri, agar siswa mampu menjajaki kejadian-kejadian dan peristiwa yang terjadi berulang kali beserta dampaknya terhadap diri sendiri, keluarga, bangsa bahkan dunia. Siswa melalui pembelajaran ilmu-ilmu sosial harus melakukan pilihan dan pengambilan keputusan dengan memperhitungkan keuntungan dan kerugian serta akibat dan tanggung jawab dari pilihan atau keputusan tersebut bagi dirinya sendiri dan orang lain.
- 2) Perspektif akademik, yang didapat siswa melalui kajian dan aplikasi pengalaman dari pembelajaran ilmu-ilmu sosial. Disiplin ilmu-ilmu sosial menyediakan berbagai pilihan pandangan. Konsep-konsep yang berasal dari disiplin ilmu-ilmu sosial seperti 'republik' atau 'warga negara' memberikan pemahaman tentang kepentingan bersama sesama warga Negara. Demikian juga konsep-konsep seperti 'golongan', 'ras', dan 'kesempatan yang sama' membantu siswa untuk hidup bersama di dalam masyarakat yang 'Bhineka tunggal Ika', dan bagaimana mendekatkan jarak antara yang dicita-citakan dengan kenyataan.
- 3) Persepektif pluralistik, berdasarkan kemajemukan. Siswa belajar menghormati perbedaan pendapat berdasarkan etnik, ras, agama, gender, golongan, dan budaya pada umumnya. Perbedaan harus difahami siswa sebagai

kenyataan dalam kehidupan, dan secara sosial dapat bersifat positif serta memperkaya. Bahwa dalam budaya dan falsafah, perbedaan bukanlah masalah yang harus dipecahkan, melainkan merupakan unsure-unsur yang sehat untuk mengembangkan kualitas yang luhur dalam masyarakat yang demokratis.

- 4) Perspektif global, agar siswa menguasai pengetahuan, keterampilan, dan komitmen yang diperlukan untuk hidup dengan bijaksana dalam dunia yang semakin surut dalam kekayaan sumber alamnya, dan yang ditandai dengan perbedaan dan kemajemukan. Dengan perspektif global, siswa mampu melihat dunia beserta penduduknya dengan pengertian dan kepedulian. Dengan perspektif ini siswa dididik untuk ikut bertanggung jawab terhadap berbagai kebutuhan hidup penduduk dunia dan komitmen untuk ikut menyelesaikan berbagai permasalahan dunia dengan adil dan damai.

Penutup

Pada akhirnya, tulisan ini ingin mengingatkan kepada para guru IPS agar dapat mengoptimalkan sumber belajar yang ada di lingkungan kehidupan sosial-masyarakat siswa. Melalui proses pembelajaran yang kreatif, pengalaman hidup anak di tengah masyarakat dengan segala dinamika kehidupan yang berkembang dapat dijadikan sebagai

sumber belajar guna menumbuhkan pribadi siswa yang bertanggungjawab, toleran, dan dinamis dalam membangun bangsa dan negara. Sudah saatnya, siswa ditempatkan pada posisi belajar aktif selama proses pembelajaran. Guru IPS berperan sebagai fasilitator, motivator, dan mediator bagi siswa untuk tercapainya tujuan pembelajaran.

Daftar Pustaka

- Bashir, Haedar. "Laptop Dewan", *Kedaulatan Rakyat*. Yogyakarta, 23 Maret 2007.
- Baskoro, Haryadi & Sunarto, Sudomo. (2010). *Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budimansyah, Dasim. (2008). *Pembelajaran Pembudayaan Nilai Pancasila*. Bandung: PT. Genesindo.
- Elmubarok, Zaim. (2008). *Membumikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta.
- Hadi, N. (1997). *Pemanfaatan Sumber Belajar Oleh Guru dan Pengaruhnya terhadap Hasil Belajar dalam Pengajaran Pendidikan IPS (Studi Kasus di Kelas III SDN Kauman I dan SDN Kotamadia Malang-Jawa Timur*. Bandung: Tesis S2 PS PIPS Sekolah Pascasarjana UPI.
- Hasan, Hamid. (1996). *Pendidikan Ilmu Sosial*. Jakarta: Depdikbud Dirjen Dikti.

- Maryani, Enok. (2011). *Pengembangan Program Pembelajaran IPS Untuk Peningkatan Keterampilan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Nucci, Larry P., Darcia Narvaez. (2008). *Handbook of Moral and Character education*. New York: Taylor & Francis.
- Pasha, Lukman . (2011). *Butir-Butir Kearifan Jawa sumber Inspirasi Kearifan Local*, Yogyakarta: IN Az Na Books.
- Santosa, Iman Budi. 2012. *Nasihat Hidup Orang Jawa*. Yogyakarta: Diva Press.
- Sauri, Sofyan dan Herlan F. (2010). *Meretas Pendidikan Nilai*. Bandung: CV Arfino Raya.
- Schuncke, G.M. (1988). *Elementary Social Studies : Knowing, Doing, Caring*. New York: Macmillan Publishing Co Ltd.
- Subarkah, Muhammad. "Arus Radikalisme Melanda Kaum Muda". *Republika*, 12 Juli 2013.
- Sukadi. (2012). "Sosok Ideal Pendidik Untuk Menyiapkan Manusia Indonesia Berkarakter Unggul Generasi 2045". *Konapsi 7 konvensi nasional Indonesia VII*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sumaatmadja, Nursid. (2005). *Konsep Dasar IPS*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Swasono, Sri Edi. (2012). Revitalisasi Pendidikan IPS dalam pembangunan karakter Bangsa. *Makalah*. Disajikan pada Seminar Pembangunan Karakter Bangsa oleh HISPISidi UNY 15 Januari 2012.

Wahjoetomo. (1994). *10 Tahun "Value Education" di Universitas Merdeka Malang*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Wiriaatmadja, Rochiati. (2002). *Pendidikan Sejarah Di Indonesia, Perspektif Lokal, Nasional, dan Global*. Bandung: Historia Utama Press FPIPS UPI.

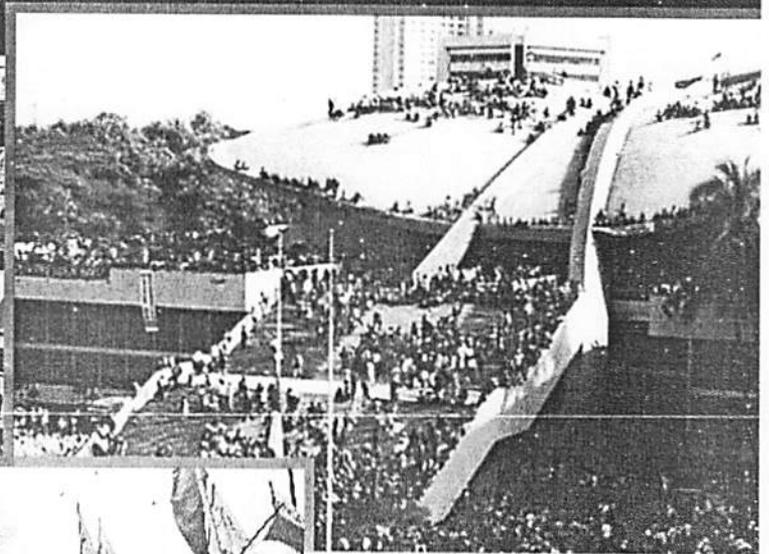
Zuchdi D, Zuhdan K.P., Muhsinatun S.M,. (2013). *Model Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: CV. Multi Presindo

PROCIDING

International Seminar

SOCIAL MOVEMENT IN HISTORICAL PERSPECTIVE

Diseminarkan Tanggal 16 Februari 2012
Auditorium FPIPS UPI



Editor:
Wawan Darmawan
Muhamad Iqbal



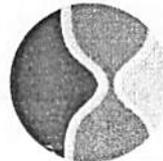
Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Universitas Pendidikan Indonesia

PROCIDING
International Seminar

**SOCIAL MOVEMENT IN
HISTORICAL PERSPECTIVE**

Diseminarkan Tanggal 16 Februari 2012
Auditorium FPIPS UPI

Editor:
Wawan Darmawan
Muhamad Iqbal



Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Universitas Pendidikan Indonesia

Bekerja Sama dengan

Prodi PIPS FPIPS UPI, Prodi Pendidikan Sejarah Pascasarjana UPI, dan
Asosiasi Pendidik dan Peneliti Sejarah (APPS)

**Prociding International Seminar
SOCIAL MOVEMENT IN HISTORICAL PERSPECTIVE**

ISBN : 978-979-18490-1-2

**Editor : Wawan Darmawan
Muhamad Iqbal**

**Desain Sampul : Ajat Sudrajat
Tata Letak : Yusman**

Cetakan I : April 2012

**Penerbit:
Jurusan Pendidikan Sejarah
FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154
Telp. (022) 2013163; E-mail: historiaupi@yahoo.com**

Bekerja Sama dengan

**Prodi PIPS FPIPS UPI, Prodi Pendidikan Sejarah Pascasarjana UPI, dan
Asosiasi Pendidik dan Peneliti Sejarah (APPS)**

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta**

Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR – iii

DAFTAR ISI – v

KAJIAN GERAKAN SOSIAL

Elit Lokal Sebagai Kekuatan Sosial dalam Pelaksanaan Cultuur Stelsel dan Pengaruh terhadap Petani di Jawa Abad XIX

Anggar Kaswati – 3

Tradisi Sekaten Kraton Yogyakarta sebagai Fakta Sosial Suatu Tinjauan Perspektif Historis
Anwar Senen – 11

Social Movement In Historical Perspective (Perubahan Sosial Ditinjau dari Perspektif Sejarah)

Gurdjita – 19

Kerusuhan Tasikmalaya 1996: Perilaku Kolektif Masyarakat Agraris dalam Perspektif Sosial-Ekonomi

Sriyanto – 22

Perjuangan Minoritas Melayu Islam di Patani (Thailand Selatan)

Subaryana – 35

Gerakan Sosial di Pedesaan Jawa Timur (Kasus Jual Beli Jabatan dan Tanah di Probolinggo)

Putri Agus Wijayati – 49

Integrasi Etnis Tionghoa di Indonesia: Refleksi Sejarah Pada Masa Kolonial Belanda

Yeni Kurniawati – 59

Trend Pergerakan Sosial Generasi Millenial

Florentinus N.H & Alexander Joseph I.W – 66

Konflik dan Dinamika Masyarakat Pedesaan "Sekitar" Perkebunan: Kasus Tanah Eks Perkebunan Karangnongko, Ngelegok, Blitar

M Nazir Salim dan Syaharuddin – 71

Pelajaran dari Kasus Konflik di Poso, Sulawesi Tengah

Murdiyah Winarti & Ratna Puspitasari – 92